



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

SINERGI NASIONAL KENDALIKAN KARHUTLA

Sri Nurhayati Qodriyatun
Analisis Legislatif Ahli Madya
sri.qodriyatun@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2025 berhasil dikendalikan berkat upaya kolaboratif seluruh pemangku kepentingan yang berjalan efektif dan cepat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan bahwa hingga 12 Agustus 2025 secara umum kondisi karhutla di berbagai daerah tetap terkendali. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara satuan tugas (satgas) darat, operasi udara, serta metode mitigasi berbasis sains dan teknologi yang terintegrasi.

Satgas darat yang dibentuk di tiap kabupaten dan kota berdampak memegang peran penting dalam respons awal. Masing-masing satgas terdiri atas sekitar 500 personel gabungan dari BNPB, TNI-Polri, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api. Mereka dibekali alat pelindung diri, pompa air, selang, serta *flexible tank* berkapasitas limatun air untuk memadamkan titik api secara cepat. Apabila kebakaran membesar dan sulit dikendalikan, BNPB mengandalkan dua strategi utama, yaitu operasi modifikasi cuaca (OMC) dan *water bombing* menggunakan helikopter. Hingga pertengahan Agustus 2025, lima pesawat dikerahkan di enam provinsi prioritas, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Selain itu, juga telah dikerahkan 12 helikopter *water bombing*, dengan penambahan khusus di wilayah Riau.

Pengawasan udara juga dilakukan secara intensif melalui 10 helikopter patroli yang memantau potensi kebakaran. Di Kalimantan Selatan, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) menggelar OMC untuk mempercepat pembentukan hujan di daerah rawan karhutla. Pesawat CASA dari Skadron Udara 4 Lanud (Pangkalan TNI angkatan udara) Abdulrachman Saleh, didukung Lanud Syamsudin Noor, menabur 800 kilogram garam (NaCl) per penerbangan sebanyak dua kali sehari selama rencana operasi berlangsung selama sepuluh hari ke depan. Penaburan garam ini dirancang untuk memperberat partikel atmosfer sehingga membentuk awan hujan, menjaga lahan gambut tetap basah, dan mencegah terjadinya kebakaran. BMKG mencatat potensi besar karhutla di lahan gambut Kalimantan Selatan pada 13 Agustus 2025, dengan sekitar 65 persen area gambut di enam kabupaten, yakni Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan Tabalong, dan Barito Kuala, memiliki muka air tanah 0–40 cm di bawah permukaan. Kondisi ini rawan kebakaran terutama saat puncak kemarau September. Menjaga lahan gambut tetap lembab menjadi kunci pencegahan karhutla yang sulit dipadamkan.

Sinergi nasional makin diperkuat dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menteri Kehutanan mengadakan pertemuan dengan Kepala BNPB dan BMKG pada 13 Agustus 2025 untuk membahas strategi penanggulangan karhutla yang lebih efektif. Pertemuan tersebut menegaskan bahwa penurunan tren karhutla dapat dicapai dengan menggabungkan pembelajaran dari pengalaman masa lalu, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (aplikasi, radar, satelit), OMC, *water bombing*, patroli udara, dan pasukan darat.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melaporkan bahwa hingga pertengahan Agustus 2025, luas karhutla mencapai 11.000 ha, mayoritas di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Data ini

diperoleh dari citra satelit dan laporan lapangan oleh Manggala Agni, TNI-Polri, dan masyarakat peduli api. Di Kalimantan Selatan, terdapat 150 ha terdampak dari 83 kejadian kebakaran, sebagian besar di lahan gambut dengan muka air tanah rendah yang sulit dikendalikan. KLH menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga, termasuk optimalisasi OMC, sebagai langkah pencegahan dan mitigasi berkelanjutan.

Secara spesifik, di Riau BNPB menambah lima helikopter *water bombing* dan melanjutkan OMC tahap ketiga untuk memicu hujan yang merata, menyesuaikan kondisi awan setempat. Operasi serupa dilaksanakan di provinsi prioritas lain dengan dukungan mitra lokal. Kepala BNPB menegaskan bahwa kondisi di enam provinsi prioritas tetap terkendali berkat mobilisasi satgas, patroli udara, dan kesiapsiagaan di area gambut hingga 300.000 ha. Penurunan jumlah titik panas dan asap, terutama di Rokan Hulu, Riau, menjadi bukti efektivitas strategi terpadu ini.

Sinergi nasional dalam pengendalian karhutla 2025 mencerminkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan kekuatan sumber daya manusia, teknologi, dan koordinasi lintas sektor. Keberhasilan menjaga karhutla tetap terkendali hingga pertengahan musim kemarau menjadi modal penting untuk menghadapi potensi risiko yang masih mungkin terjadi menjelang puncak kemarau pada September.

Atensi DPR

Komisi IV DPR RI perlu memberikan atensi serius terhadap penanganan karhutla yang meski terkendali, tetapi tetap menunjukkan kerentanan tinggi, terutama di lahan gambut dengan muka air tanah rendah. Pengawasan Komisi IV DPR RI perlu difokuskan pada efektivitas koordinasi lintas lembaga, termasuk kesiapan satgas darat, optimalisasi operasi udara, serta keberlanjutan OMC di wilayah rawan gambut. Dari sisi legislasi, diperlukan evaluasi regulasi yang mengatur perlindungan ekosistem gambut, penegakan hukum terhadap pembakaran lahan, serta insentif bagi masyarakat yang terlibat dalam pencegahan karhutla. Sementara pada fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI dapat memastikan ketersediaan alokasi yang memadai bagi pengadaan peralatan, teknologi deteksi dini, serta dukungan operasional satgas di daerah prioritas. Atensi ini penting agar capaian positif tahun ini berlanjut dan risiko kebakaran di puncak musim kemarau dapat diminimalkan secara berkelanjutan.

Sumber

antaranews.com, 14 Agustus 2025;
bnpb.go.id, 7 Agustus 2025;
hijau.bisnis.com, 15 Agustus 2025;
idntimes.com, 13 Agustus 2025;
infopublik.id, 8 Agustus 2025;

menpan.go.id, 13 Agustus 2025;
metrotvnews.com, 13 Agustus 2025;
rri.co.id, 14 Agustus 2025;
tempo.co, 13 Agustus 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R
Anugrah Juwita S

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*